KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN EKOLOGI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Bulan Sukainah[1], Galih Tyas Anjari[2], Farah Azzahra[3], Mifta Nur Sifa[4], Naila Devi Novitasari[5], Sefilia Rahmadani[6], Siswadi[7]
[1-7] UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
[1] 254110406010@mhs.uinsaizu.ac.id, [2] 254110406018@mhs.uinsaizu.ac.id, [3] 254110406015@mhs.uinsaizu.ac.id, [4] 254110406026@mhs.uinsaizu.ac.id , [5] 254110406028@mhs.uinsaizu.ac.id , [6] 254110406037@mhs.uinsaizu.ac.id , [7] siswadi@uinsaizu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of educational leadership in developing social ecology and community empowerment from the perspective of the sociology of education. It employs a qualitative approach using a literature review method. The sources comprise scholarly literature on educational leadership, social ecology, social capital, school–community partnerships, and community empowerment. The literature is analyzed thematically by identifying and synthesizing relevant concepts. The findings indicate that educational leadership plays a strategic role in connecting educational institutions with families and communities through social needs assessment, trust building, partnership development, and collaborative programs. Social capital provides an important foundation for community participation, while the social ecological perspective explains the interrelationships among family environments, schools, communities, and broader social structures in shaping educational opportunities. Community empowerment can be fostered by improving literacy, skills, participation, and self-reliance. This article proposes a conceptual framework comprising social mapping, strengthening social relationships, implementing collaborative programs, and conducting participatory evaluation to ensure sustainability. The study emphasizes that educational leadership should be visionary, adaptive, and inclusive to enable education to contribute to sustainable social change.

Keywords: *educational leadership, social ecology, sociology of education, social capital, community empowerment.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan pendidikan dalam membangun ekologi sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui perspektif sosiologi pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari literatur ilmiah yang membahas kepemimpinan pendidikan, ekologi sosial, modal sosial, kemitraan sekolah dan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Analisis dilakukan melalui analisis isi tematik dengan mengidentifikasi dan menyintesiskan konsep-konsep yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan memiliki peran strategis dalam menghubungkan lembaga pendidikan dengan keluarga dan masyarakat melalui pemetaan kebutuhan sosial, penguatan kepercayaan, pengembangan kemitraan, dan pelaksanaan program kolaboratif. Modal sosial

menjadi landasan penting bagi partisipasi masyarakat, sedangkan perspektif ekologi sosial menjelaskan keterkaitan antara lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan struktur sosial dalam membentuk kesempatan pendidikan. Pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan melalui peningkatan literasi, keterampilan, partisipasi, dan kemandirian warga. Artikel ini merumuskan kerangka konseptual yang mencakup pemetaan sosial, penguatan hubungan sosial, pelaksanaan program kolaboratif, serta evaluasi partisipatif dan keberlanjutan. Kajian ini menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan perlu dijalankan secara visioner, adaptif, dan inklusif agar pendidikan berkontribusi terhadap perubahan sosial yang berkelanjutan.

Kata kunci: kepemimpinan pendidikan, ekologi sosial, sosiologi pendidikan, modal sosial, pemberdayaan masyarakat.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan institusi sosial yang berperan dalam membentuk pengetahuan, nilai, keterampilan, dan pola hubungan antarmanusia. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga oleh kondisi keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan kesempatan sosial yang tersedia bagi peserta didik. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, sekolah merupakan bagian dari struktur masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, persoalan pendidikan perlu dipahami dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang memengaruhi kesempatan belajar, partisipasi masyarakat, dan perkembangan sumber daya manusia.

Perbedaan latar belakang ekonomi, akses terhadap sumber belajar, tingkat pendidikan orang tua, dan dukungan lingkungan dapat memengaruhi pengalaman pendidikan peserta didik. Bourdieu (1986) menjelaskan bahwa modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial memiliki peran dalam membentuk posisi individu dalam struktur sosial. Perbedaan kepemilikan modal tersebut dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam mendukung pendidikan anak. Dalam kondisi demikian, lembaga pendidikan tidak cukup hanya menjalankan fungsi pengajaran, tetapi juga perlu membangun lingkungan yang mampu memperluas partisipasi dan kesempatan belajar bagi

kelompok masyarakat dengan kondisi sosial yang beragam.

Persoalan tersebut berkaitan dengan konsep ekologi sosial, yaitu cara memahami hubungan antara individu, lingkungan sosial, institusi, dan struktur yang membentuk kehidupan bersama. Bronfenbrenner (1979), melalui teori ekologi perkembangan manusia, menjelaskan bahwa perkembangan individu berlangsung dalam sistem lingkungan yang saling berhubungan, mulai dari keluarga dan sekolah hingga struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks pendidikan, perspektif ini memberikan dasar untuk memahami bahwa perkembangan peserta didik tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara keluarga, sekolah, kelompok sebaya, masyarakat, dan kebijakan publik. Meskipun teori Bronfenbrenner berfokus pada perkembangan manusia, kerangka tersebut relevan untuk menganalisis keterkaitan lingkungan sosial dengan proses pendidikan.

Dalam hubungan tersebut, kepemimpinan pendidikan memiliki posisi strategis karena pemimpin dapat menghubungkan kepentingan sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Kepala sekolah, kepala madrasah, dan pengelola lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan organisasi dan pencapaian akademik, tetapi juga perlu membangun hubungan yang produktif dengan orang tua, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dan berbagai organisasi sosial. Leithwood, Harris, dan Hopkins (2020) menegaskan pentingnya kepemimpinan sekolah dalam mendukung keberhasilan pendidikan, terutama melalui pengaruhnya terhadap kondisi organisasi dan praktik pembelajaran. Kepemimpinan yang efektif dengan demikian perlu memperhatikan faktor internal lembaga sekaligus lingkungan sosial yang memengaruhi proses pendidikan.

Namun, hubungan antara kepemimpinan pendidikan dan masyarakat tidak cukup dibangun melalui komunikasi administratif atau pelibatan masyarakat dalam kegiatan seremonial. Kemitraan yang bermakna memerlukan kepercayaan, partisipasi, pembagian tanggung jawab, dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Epstein (2011) menempatkan hubungan sekolah, keluarga, dan masyarakat

sebagai bagian penting dalam membangun lingkungan yang mendukung keberhasilan peserta didik. Perspektif ini menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan juga dapat dilihat dari kemampuannya membangun kerja sama lintas lingkungan sosial, bukan semata-mata dari keberhasilan menjalankan program internal sekolah.

Kajian Siswadi dan Pahlawi (2025) mengenai pengembangan kepemimpinan berbasis modal sosial dalam konteks pendidikan menempatkan jejaring sosial, kepercayaan, dan hubungan antaranggota sebagai unsur penting dalam penguatan kepemimpinan. Sejalan dengan itu, Siswadi dan Afandi (2025) membahas kepemimpinan pendidikan berbasis ekoteologi, sedangkan Siswadi dkk. (2026) menekankan strategi kepemimpinan berbasis modal sosial untuk membangun budaya mutu pendidikan. Ketiga kajian tersebut memberikan landasan untuk melihat kepemimpinan pendidikan sebagai proses sosial yang mengandalkan hubungan antarmanusia, nilai bersama, dan tanggung jawab kelembagaan.

Meskipun demikian, hubungan antara kepemimpinan pendidikan, ekologi sosial, dan pemberdayaan masyarakat perlu dibahas secara terpadu. Kepemimpinan berbasis modal sosial menjelaskan pentingnya kepercayaan dan jejaring, sedangkan perspektif ekologi sosial membantu memahami hubungan antara lembaga pendidikan dan lingkungannya. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat menekankan peningkatan kemampuan warga untuk berpartisipasi, mengakses sumber daya, dan menentukan arah perubahan sosial. Ketiganya dapat dipertemukan untuk menjelaskan bagaimana lembaga pendidikan berkontribusi terhadap penguatan kapasitas masyarakat tanpa mengabaikan ketimpangan sosial yang memengaruhi akses dan kesempatan belajar.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan pendidikan dalam membangun ekologi sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui perspektif sosiologi pendidikan. Pembahasan diarahkan pada tiga persoalan utama, yaitu hubungan antara pendidikan dan lingkungan sosial, strategi kepemimpinan dalam

membangun kemitraan sosial, serta kontribusi lembaga pendidikan terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Artikel ini menggunakan kajian pustaka untuk menyusun kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara kepemimpinan, modal sosial, partisipasi masyarakat, dan perubahan sosial melalui pendidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena pembahasan berfokus pada analisis konseptual mengenai kepemimpinan pendidikan, ekologi sosial, sosiologi pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan literatur ilmiah yang relevan. Studi pustaka memungkinkan peneliti mengidentifikasi gagasan utama, membandingkan perspektif teoretis, serta merumuskan hubungan antarkonsep untuk menjelaskan peran kepemimpinan pendidikan dalam konteks sosial yang lebih luas.

Sumber kajian meliputi artikel jurnal ilmiah dan karya teoretis yang membahas kepemimpinan pendidikan, modal sosial, hubungan sekolah dengan keluarga dan masyarakat, ekologi perkembangan manusia, serta pemberdayaan sosial. Literatur yang digunakan antara lain pemikiran Bronfenbrenner (1979), Bourdieu (1986), Putnam (2000), Epstein (2011), dan Leithwood dkk. (2020). Kajian juga memasukkan karya Siswadi yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan visioner, kepemimpinan adaptif, ekoteologi, kepemimpinan berbasis modal sosial, dan penguatan budaya mutu pendidikan.

Pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran publikasi ilmiah berdasarkan kesesuaian tema, relevansi konseptual, dan keterkaitannya dengan fokus pembahasan. Literatur kemudian dibaca dan dikelompokkan ke dalam empat tema: (1) pendidikan sebagai institusi sosial; (2) ekologi sosial dan lingkungan pendidikan; (3) kepemimpinan pendidikan berbasis modal sosial dan kolaborasi; serta (4) pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan.

Analisis dilakukan menggunakan analisis isi tematik. Setiap sumber ditelaah untuk mengidentifikasi konsep, argumentasi, dan hubungan antartema. Selanjutnya, gagasan dari berbagai sumber dibandingkan untuk

menemukan titik temu dan perbedaan perspektif. Hasil analisis disintesiskan menjadi argumentasi konseptual mengenai kepemimpinan pendidikan yang menghubungkan pengelolaan lembaga, penguatan jejaring sosial, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan. Karena penelitian ini berbasis pustaka, hasil yang disajikan merupakan sintesis teoretis, bukan laporan temuan observasi atau wawancara lapangan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pendidikan sebagai Bagian dari Ekologi Sosial Masyarakat

Pendidikan tidak berlangsung dalam ruang sosial yang terpisah dari kehidupan masyarakat. Sekolah berada di tengah lingkungan yang memiliki karakteristik ekonomi, budaya, nilai, struktur kekuasaan, dan pola hubungan sosial tertentu. Kondisi tersebut memengaruhi cara peserta didik belajar, keterlibatan keluarga, serta kemampuan lembaga pendidikan menjalankan fungsinya. Karena itu, analisis pendidikan perlu memperhatikan hubungan antara lingkungan belajar dan struktur masyarakat yang lebih luas.

Bronfenbrenner (1979) menjelaskan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh sistem lingkungan yang saling berkaitan. Dalam konteks pendidikan, keluarga dan sekolah merupakan lingkungan terdekat yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Hubungan antara keduanya, misalnya melalui komunikasi orang tua dan guru, turut menentukan konsistensi dukungan terhadap proses belajar. Pada tingkat yang lebih luas, kebijakan pendidikan, kondisi pekerjaan orang tua, ketersediaan fasilitas publik, dan norma masyarakat juga dapat memengaruhi kesempatan pendidikan.

Perspektif ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak selalu dapat diselesaikan melalui perubahan metode mengajar atau penyediaan fasilitas sekolah. Ketika peserta didik mengalami kesulitan belajar karena keterbatasan dukungan keluarga, misalnya, sekolah perlu membangun komunikasi dengan orang tua dan mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Demikian pula, rendahnya partisipasi masyarakat tidak seharusnya langsung dipahami sebagai bentuk ketidakpedulian. Hambatan ekonomi, keterbatasan waktu, pengalaman buruk dengan

institusi, atau kurangnya akses informasi dapat memengaruhi kemampuan warga untuk terlibat.

Bourdieu (1986) membantu menjelaskan mengapa kesempatan pendidikan tidak selalu terbagi secara merata. Keluarga dengan modal ekonomi, budaya, dan sosial yang lebih kuat cenderung memiliki akses lebih besar terhadap sumber belajar dan jaringan pendukung pendidikan. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi cara peserta didik beradaptasi dengan tuntutan sekolah. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya memperlakukan seluruh peserta didik secara formal sama, tetapi juga memperhatikan perbedaan kebutuhan dan hambatan yang mereka hadapi.

Dalam hubungan ini, ekologi sosial pendidikan dapat dipahami sebagai jaringan interaksi antara individu, keluarga, sekolah, masyarakat, dan struktur kelembagaan yang membentuk pengalaman pendidikan. Konsep ini bukan sekadar menunjuk lingkungan fisik sekolah, melainkan juga mencakup kualitas hubungan sosial, distribusi sumber daya, partisipasi warga, dan nilai yang berkembang dalam kehidupan bersama. Van Tol (2024), melalui pembahasan model ekologi sosial pendidikan, juga menyoroti hubungan antara ekonomi, pendidikan, dan kewargaan. Perspektif tersebut memperkuat pandangan bahwa pendidikan perlu membangun kapasitas warga untuk terlibat dalam kehidupan sosial, bukan hanya menyiapkan individu memasuki pasar kerja.

Dengan demikian, kualitas ekologi sosial pendidikan dapat dilihat dari sejauh mana lingkungan di sekitar lembaga pendidikan mendukung pembelajaran, memperluas kesempatan, dan mendorong kerja sama. Sekolah yang memiliki hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat berpotensi memperoleh dukungan yang lebih luas dalam menjalankan program pendidikan. Namun, hubungan tersebut tidak terbentuk dengan sendirinya. Diperlukan kepemimpinan yang mampu mengidentifikasi kebutuhan sosial, membangun kepercayaan, dan mengarahkan kerja sama pada tujuan pendidikan yang jelas.

2. Kepemimpinan Pendidikan sebagai Penghubung Sekolah dan Masyarakat

Kepemimpinan pendidikan memiliki fungsi yang lebih luas daripada mengatur pembagian tugas, mengawasi pelaksanaan program, dan memastikan tercapainya target akademik. Pemimpin juga berperan mengembangkan visi bersama, membangun budaya organisasi, serta menghubungkan sumber daya lembaga dengan kebutuhan lingkungan sosialnya. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, peran ini penting karena sekolah merupakan organisasi yang bekerja di tengah beragam kepentingan dan latar belakang masyarakat.

Leithwood dkk. (2020) menempatkan kepemimpinan sekolah sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Pengaruh kepemimpinan tidak hanya muncul melalui keputusan langsung, tetapi juga melalui pembentukan kondisi kerja guru, penguatan budaya organisasi, dan pengembangan lingkungan pembelajaran. Apabila perspektif ini diperluas ke hubungan sekolah dengan masyarakat, pemimpin perlu memastikan bahwa visi lembaga diterjemahkan menjadi kerja sama yang nyata dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Siswadi (2024a), dalam kajiannya mengenai kepemimpinan pendidikan visioner berbasis inovasi, menekankan pentingnya visi dan kemampuan berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Gagasan tersebut relevan bagi pembangunan ekologi sosial karena pemimpin membutuhkan arah yang jelas ketika menghubungkan program sekolah dengan perubahan lingkungan. Visi pendidikan tidak cukup berhenti pada peningkatan prestasi akademik, tetapi dapat dikembangkan untuk memperkuat literasi masyarakat, kepedulian sosial, budaya kolaborasi, dan kemampuan warga menghadapi perubahan.

Sementara itu, Siswadi (2024b) membahas tantangan kepemimpinan pendidikan adaptif di era digital, termasuk kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi terhadap perubahan. Tantangan tersebut memperlihatkan bahwa pemimpin perlu memahami kondisi nyata lingkungan organisasi sebelum menetapkan kebijakan. Program digitalisasi, misalnya, tidak akan memberikan manfaat yang merata apabila hanya memperhatikan ketersediaan perangkat tanpa mempertimbangkan kemampuan

guru, akses internet, dan kondisi keluarga peserta didik.

Kepemimpinan yang peka terhadap ekologi sosial perlu menjalankan setidaknya tiga fungsi. Pertama, fungsi pemetaan sosial, yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, kondisi keluarga, potensi masyarakat, dan hambatan yang memengaruhi proses pendidikan. Kedua, fungsi penghubung, yaitu mempertemukan sekolah dengan orang tua, pemerintah desa, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lain yang memiliki sumber daya relevan. Ketiga, fungsi penguatan partisipasi, yaitu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, ikut merencanakan kegiatan, dan mengevaluasi manfaat program.

Epstein (2011) menjelaskan pentingnya kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan peserta didik. Kemitraan tersebut perlu diwujudkan melalui komunikasi yang teratur, keterlibatan keluarga dalam pembelajaran, kolaborasi dalam kegiatan sekolah, dan hubungan dengan komunitas yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai penerima informasi atau penyedia bantuan, tetapi sebagai mitra dalam membangun lingkungan pendidikan.

Meskipun demikian, kepemimpinan kolaboratif tidak berarti seluruh keputusan harus diserahkan kepada masyarakat. Pemimpin tetap bertanggung jawab menjaga mutu akademik, memenuhi ketentuan kelembagaan, dan memastikan setiap keputusan berpihak pada kepentingan pendidikan. Partisipasi perlu dikelola agar tidak didominasi kelompok yang memiliki pengaruh ekonomi atau sosial lebih besar. Dalam hal ini, kepemimpinan yang baik bukan hanya memperluas keterlibatan, melainkan juga memastikan bahwa suara kelompok yang kurang terwakili memperoleh ruang yang layak.

3. Modal Sosial sebagai Dasar Kolaborasi Pendidikan

Modal sosial merupakan salah satu konsep penting untuk menjelaskan bagaimana hubungan antarindividu dapat mendukung tindakan bersama. Putnam (2000) mengaitkan modal sosial dengan jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang mempermudah koordinasi serta kerja sama. Dalam pendidikan, modal sosial dapat

berkembang melalui hubungan yang sehat antara kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, alumni, dan masyarakat.

Siswadi dan Pahlawi (2025), dalam kajian mengenai pengembangan kepemimpinan berbasis modal sosial dalam konteks pendidikan, menempatkan kepercayaan dan jejaring sosial sebagai unsur penting dalam pengembangan kepemimpinan. Sementara itu, Siswadi dkk. (2026) membahas strategi kepemimpinan berbasis modal sosial dalam membangun budaya mutu pendidikan, termasuk penguatan kolaborasi internal, keterlibatan orang tua, dan pengembangan kemitraan eksternal. Kedua kajian tersebut mendukung pemahaman bahwa mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan individual pemimpin, tetapi juga pada kualitas hubungan yang dibangun di dalam dan di luar lembaga.

Dalam praktiknya, modal sosial dapat dibangun melalui kegiatan yang memungkinkan warga berinteraksi secara setara dan berorientasi pada tujuan bersama. Forum komunikasi sekolah dan orang tua, pertemuan rutin dengan komite sekolah, program pendampingan belajar, kegiatan literasi masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga lokal dapat menjadi sarana membangun kepercayaan. Namun, kegiatan tersebut hanya menghasilkan modal sosial yang bermakna apabila hubungan yang terbentuk berlangsung secara konsisten dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Modal sosial juga memiliki sisi kritis. Jaringan yang kuat tidak selalu bersifat inklusif. Hubungan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dapat memperkuat eksklusivitas dan menutup akses pihak lain. Karena itu, pemimpin pendidikan harus memastikan bahwa kerja sama tidak hanya berlangsung di antara orang-orang yang telah memiliki kedekatan sosial, melainkan juga membuka peluang bagi keluarga kurang mampu, kelompok marginal, dan warga yang selama ini kurang terlibat.

Dari sudut pandang ini, modal sosial tidak seharusnya diukur hanya dari banyaknya mitra atau frekuensi pertemuan. Indikator yang lebih substantif mencakup tingkat kepercayaan, keterbukaan komunikasi, pemerataan partisipasi,

keberlanjutan kerja sama, dan kemampuan bersama menyelesaikan persoalan pendidikan. Dengan demikian, kepemimpinan berbasis modal sosial dapat menjadi mekanisme yang menghubungkan sumber daya lembaga pendidikan dengan kapasitas masyarakat untuk bertindak secara kolektif.

4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepemimpinan Pendidikan

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses memperkuat kemampuan individu dan kelompok untuk memahami persoalan, mengakses sumber daya, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam perubahan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks pendidikan, pemberdayaan tidak cukup diwujudkan melalui penyuluhan atau pelatihan sesaat. Proses tersebut memerlukan kesempatan belajar yang berkelanjutan, penguatan keterampilan, perluasan jaringan, dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebutuhan serta prioritas program.

Freire (1970) menekankan pendidikan sebagai proses yang memungkinkan manusia memahami realitas sosial dan bertindak secara reflektif terhadap kondisi yang dihadapinya. Pemikiran ini memberi dasar bagi pendidikan yang tidak hanya memindahkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kesadaran kritis dan kemampuan bertindak. Dalam konteks pemberdayaan, lembaga pendidikan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan literasi, keterampilan, kemampuan berorganisasi, serta pemahaman terhadap persoalan sosial di lingkungannya.

Pemimpin pendidikan berperan mengarahkan potensi tersebut melalui program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekolah atau madrasah, misalnya, dapat memfasilitasi kegiatan literasi keluarga, pelatihan keterampilan digital, pendampingan usaha mikro, penguatan pendidikan karakter, dan kegiatan pelestarian lingkungan. Program semacam itu perlu dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan, bukan semata-mata mengikuti tren atau kepentingan kelembagaan. Keberhasilannya juga perlu dinilai dari manfaat yang diterima masyarakat, bukan hanya dari jumlah kegiatan yang terlaksana.

Dalam kajian Siswadi (2024c) mengenai kepemimpinan pendidikan

berbasis ekoteologi, kepemimpinan dikaitkan dengan integrasi nilai moral dan spiritual serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Perspektif tersebut dapat memperluas pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan lingkungan, pembentukan budaya sekolah yang peduli terhadap alam, dan pengembangan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan ekonomi, tetapi juga pada penguatan tanggung jawab sosial dan ekologis.

Pemberdayaan yang berkelanjutan juga menuntut perubahan posisi masyarakat dari penerima manfaat menjadi pelaku utama. Jika sekolah menyelenggarakan pelatihan keterampilan, misalnya, warga perlu dilibatkan dalam menentukan materi, waktu, dan bentuk pendampingan. Jika program berfokus pada lingkungan, masyarakat perlu dilibatkan dalam mengenali persoalan, menyusun tindakan, dan memelihara hasil kegiatan. Keterlibatan tersebut memperkuat rasa memiliki sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal.

Meski demikian, lembaga pendidikan tidak dapat mengambil alih seluruh tanggung jawab pembangunan masyarakat. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, waktu, dan kewenangan harus diperhitungkan dalam merancang program. Karena itu, pemimpin perlu membangun kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi sosial agar pemberdayaan memiliki dukungan yang memadai. Kerja sama tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan pendidikan dan menghindari pemanfaatan lembaga untuk kepentingan kelompok tertentu.

5. Integrasi Kepemimpinan, Ekologi Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan sintesis literatur, kepemimpinan pendidikan, ekologi sosial, dan pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai tiga unsur yang saling berkaitan. Ekologi sosial memberikan kerangka untuk membaca hubungan dan kondisi lingkungan yang memengaruhi pendidikan. Kepemimpinan menyediakan arah, koordinasi, dan mekanisme untuk membangun hubungan tersebut.

Sementara itu, pemberdayaan menjadi orientasi perubahan, yaitu memperkuat kemampuan masyarakat untuk terlibat dan bertindak secara mandiri.

Integrasi tersebut dapat dirumuskan dalam empat tahapan konseptual. Pertama, pemetaan sosial, yaitu mengenali kebutuhan pendidikan, kondisi keluarga, potensi lokal, dan ketimpangan akses. Kedua, penguatan hubungan sosial, yaitu membangun kepercayaan dan komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Ketiga, pelaksanaan program kolaboratif, yaitu menyusun kegiatan berdasarkan kebutuhan bersama dengan pembagian peran yang jelas. Keempat, evaluasi partisipatif dan keberlanjutan, yaitu menilai manfaat program, memperbaiki kelemahan, serta memastikan masyarakat memiliki kapasitas untuk melanjutkan kegiatan.

Kerangka tersebut sejalan dengan gagasan kepemimpinan visioner yang dibahas Siswadi (2024a), kepemimpinan adaptif Siswadi (2024b), dan kepemimpinan berbasis ekoteologi Siswadi (2024c). Perspektif modal sosial dari Siswadi dan Pahlawi (2025), serta strategi penguatan budaya mutu oleh Siswadi dkk. (2026), melengkapi kerangka tersebut dengan penekanan pada kepercayaan, kolaborasi, dan penguatan hubungan kelembagaan.

Namun, kerangka ini merupakan hasil sintesis konseptual dari literatur, bukan model empiris yang telah diuji melalui penelitian lapangan. Kontribusi utamanya terletak pada upaya mempertemukan dimensi pengelolaan organisasi, hubungan sosial, dan pemberdayaan dalam satu alur analisis. Kerangka ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian berikutnya yang menguji bagaimana kepemimpinan pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, pemerataan akses, dan keberlanjutan program pemberdayaan dalam konteks sosial yang berbeda.

Secara kritis, keberhasilan integrasi tersebut bergantung pada kemampuan pemimpin mengatasi hambatan struktural. Kepercayaan tidak dapat menggantikan kebutuhan terhadap sumber daya yang memadai, dan partisipasi tidak otomatis menghapus ketimpangan sosial. Karena itu, kepemimpinan pendidikan perlu memadukan kolaborasi dengan kebijakan yang

inklusif, transparansi penggunaan sumber daya, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dengan cara tersebut, pendidikan dapat berperan sebagai institusi yang tidak hanya mereproduksi struktur sosial yang ada, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

D. Kesimpulan

Kepemimpinan pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun ekologi sosial yang mendukung pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, keberhasilan lembaga pendidikan tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan struktur sosial yang memengaruhi kesempatan belajar. Oleh karena itu, pemimpin pendidikan perlu melampaui fungsi administratif dengan membangun kemitraan, memperkuat kepercayaan, dan mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ekologi sosial pendidikan yang kuat ditandai oleh hubungan antarpihak yang terbuka, partisipasi yang inklusif, serta dukungan terhadap pemerataan kesempatan belajar. Modal sosial menjadi salah satu dasar penting untuk membangun hubungan tersebut, tetapi perlu dikelola secara kritis agar tidak hanya menguntungkan kelompok yang telah memiliki akses dan pengaruh. Dalam hal ini, kepemimpinan pendidikan harus mampu menghubungkan sumber daya kelembagaan dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang beragam.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan perlu diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan mengambil keputusan, dan kemandirian warga. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui program literasi, pengembangan keterampilan, kemitraan sosial, serta pendidikan yang memperkuat tanggung jawab sosial dan ekologis. Keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah kegiatan, tetapi perlu dilihat dari manfaatnya bagi masyarakat, pemerataan partisipasi, dan keberlanjutan hasilnya.

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini merumuskan kerangka konseptual yang menghubungkan pemetaan sosial, penguatan hubungan sosial, pelaksanaan

program kolaboratif, serta evaluasi partisipatif dan keberlanjutan. Kerangka tersebut menempatkan kepemimpinan sebagai penghubung antara kapasitas lembaga pendidikan dan potensi masyarakat. Implikasi utamanya adalah bahwa pendidikan dapat berkontribusi terhadap perubahan sosial apabila kepemimpinan dijalankan secara visioner, adaptif, inklusif, dan bertanggung jawab. Pengujian lebih lanjut melalui penelitian lapangan diperlukan untuk memahami penerapan kerangka tersebut dalam konteks lembaga pendidikan dan karakteristik masyarakat yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. G. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (hlm. 241–258). Greenwood Press.

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Harvard University Press.

Epstein, J. L. (2011). School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools (edisi ke-2). Westview Press.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Herder and Herder.

Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. School Leadership & Management, 40(1), 5–22. https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.

Siswadi. (2024a). Kepemimpinan pendidikan visioner berbasis inovatif dalam peningkatan mutu pendidikan. Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah, 9(1), 140–149. https://doi.org/10.34125/jkps.v9i1.2043

Siswadi. (2024b). Mengurai problematika masa depan kepemimpinan pendidikan adaptif di era digital. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(2), 200–210. https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.43964

Siswadi. (2024c). Paradigma kepemimpinan pendidikan dalam menyongsong ekoteologi di era disrupsi. Jurnal Manajemen Pendidikan, 9(3), 506–513. https://doi.org/10.34125/jmp.v9i3.2005

Siswadi, & Pahlawi, M. N. (2025). Pengembangan kepemimpinan berbasis modal sosial dalam konteks pendidikan: Sebuah tinjauan literatur. J-PGMI: Jurnal Pendidikan Guru MI, 8(2). https://doi.org/10.24090/j-pgmi.v8i2.15629

Siswadi, S., Afandi, R., Mukroji, M., Sulistyawan, G. D., & Sofati, S. (2026). Strategi kepemimpinan berbasis modal sosial dalam membangun budaya mutu pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 11(1), 1450–1456. https://doi.org/10.34125/jmp.v11i1.1945

van Tol, J. (2024). A social ecological model of education: Economic problems, citizenship solutions. The Journal of Environmental Education, 55(3), 249–266. https://doi.org/10.1080/00958964.2023.2284245